

PENGUMUMAN TENDER

No. 28/ 15 /DMAP-GPPS-PBS/PENG/B tanggal 30 Maret 2026

Bank Indonesia akan melaksanakan Tender Pengadaan Konsultan Perancang Rumah Dinas Bank Indonesia Kantor Pusat Kemanggisan, Jakarta, dengan nomor Pengadaan RFQ: 52888, melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Ruang lingkup Pekerjaan adalah perancangan Rumah Dinas Bank Indonesia (RDBI) Kantor Pusat Kemanggisan.
- II. Pagu anggaran sejumlah **Rp8.646.483.000,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)** sudah termasuk PPN 12%.

III. Persyaratan Peserta Tender:

1. Perusahaan Tunggal (bukan berbentuk konsorsium);
2. Badan usaha berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peserta telah terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia pada *E-Procurement* Bank Indonesia;
4. Perusahaan bergerak di bidang perencana Pekerjaan konstruksi dan memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) / Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang berwenang mengeluarkan sertifikasi, yaitu klasifikasi/sub klasifikasi (sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 5 Tahun 2021) sebagai berikut:

Bidang	Sub Klasifikasi	Kode Sub Klasifikasi	Kualifikasi
Perencanaan Arsitektur	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	AR001	Besar

Dalam hal sertifikasi dalam proses perpanjangan dan/atau peralihan, maka harus menyampaikan tanda terima bukti pengurusan dari LPJK/LSBU yang berwenang mengeluarkan sertifikasi.

5. Perusahaan harus memiliki pengalaman dalam pekerjaan perancangan untuk:
 - a. Bangunan hunian vertikal atau hotel di atas lima lantai tidak termasuk basemen; dan
 - b. Bangunan bertingkat yang dilengkapi dengan semi-basemen atau basemen.Pengalaman tersebut dapat dipenuhi dalam satu kontrak atau lebih dan merupakan proyek yang telah selesai terbangun dalam kurun waktu lima tahun terakhir (Maret 2021 s.d. Maret 2026) yang dibuktikan dengan:
 - a. Surat Perintah Kerja/Perjanjian/*Purchase Order* (PO) yang disertai dokumen pendukung lain yang menjelaskan jumlah lantai bangunan dan basemen; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lain yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan telah selesai.
6. Perusahaan memiliki Laporan Keuangan minimal tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian;
7. Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan minimal tahun 2024 dengan menyampaikan paling kurang bukti penerimaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
8. Dalam hal pernah melaksanakan proyek di Bank Indonesia, perusahaan tidak pernah memiliki *history* penilaian kinerja kurang baik dari Bank Indonesia dalam kurun waktu dua tahun terakhir (Maret 2024 s.d. Maret 2026);
9. Perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam pada INAPROC dengan status tayang; dan
10. Membuat Surat Pernyataan:
 - a. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
 - b. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
 - c. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - d. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
 - e. Tidak terafiliasi kepengurusan perusahaan dengan peserta lain yang ikut mendaftar pada pengadaan ini; dan
 - f. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.
- IV. Pendaftaran calon Peserta Tender dilakukan melalui <https://eprocurement.bi.go.id> dengan batas waktu pendaftaran mulai tanggal **31 Maret s.d. 8 April 2026**, dengan melengkapi dokumen pendaftaran calon Peserta Tender dan mengunggah dokumen (tidak dalam bentuk *link*) ke <https://eprocurement.bi.go.id> yang terdiri dari:
 1. *Scan* surat permohonan untuk menjadi Peserta Tender yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili perseroan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) diatas meterai Rp10.000,00.
 2. *Scan* sertifikasi yang masih berlaku sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.4. di atas. Dalam hal sertifikasi dalam proses perpanjangan dan/atau peralihan, maka harus menyampaikan tanda terima bukti pengurusan dari LPJK/LSBU yang berwenang mengeluarkan sertifikasi.

3. Dokumen yang menyatakan lingkup Pekerjaan dan bahwa Pekerjaan telah selesai, yang membuktikan bahwa Perusahaan memiliki pengalaman Pekerjaan sebagaimana butir III.5. yang telah selesai dalam periode lima tahun terakhir (Maret 2021 – Maret 2026) sebagai berikut:
 - a. *Scan* Surat Perintah Kerja/Perjanjian/*Purchase Order* (PO) yang disertai dokumen pendukung lain yang menjelaskan jumlah lantai bangunan dan basemen; dan
 - b. *Scan* Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lain yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan telah selesai.
4. *Scan* Laporan Keuangan minimal Tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian sebagaimana butir III.6. di atas;
5. *Scan* bukti pemenuhan kewajiban perpajakan minimal Tahun 2024 sebagaimana butir III.7. di atas.
6. *Scan* surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili perseroan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) di atas meterai Rp10.000,00, yang memuat poin-poin pernyataan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
 - b. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
 - c. Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - d. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
 - e. Tidak terafiliasi kepengurusan perusahaan dengan peserta lain yang ikut mendaftar pada pengadaan ini; dan
 - f. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.Seluruh pernyataan huruf a. s/d f. di atas dinyatakan dalam satu Surat Pernyataan.
- V. Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon Peserta Tender secara lengkap serta memenuhi persyaratan melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Tender.
- VI. Dalam hal calon Peserta mengalami kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, silakan menghubungi petugas *helpdesk E-Procurement* pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat *e-mail*: Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id.
- VII. Komitmen Integritas Pengadaan
 1. Pelaksanaan Pengadaan tunduk pada ketentuan Pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
 2. Pengadaan di Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip anti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme serta gratifikasi. Panitia Pengadaan dan Peserta Tender wajib mematuhi komitmen ini.
 3. Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun dari setiap proses Pengadaan.
 4. Dalam hal terdapat hal-hal yang bertentangan dengan komitmen tersebut, harap segera laporkan melalui *whistleblowing system* Bank Indonesia melalui https://www.bi.go.id/wbsbi/add_wbs2.aspx.

PANITIA TENDER

KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan : Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT.

Dalam rangka mengikuti Tender Pengadaan Konsultan Perancang Rumah Dinas Bank Indonesia Kantor Pusat Kemanggisian, Jakarta, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
2. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
3. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
4. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
5. Tidak terafiliasi kepengurusan perusahaan dengan peserta lain yang ikut mendaftar pada pengadaan ini; dan
6. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00

(.....)
Tanda-tangan Direktur Utama/
Direktur/ Pimpinan/ Penanggung
Jawab Perusahaan dan cap
perusahaan

Note: dalam hal yang menandatangani bukan Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan yang berwenang sesuai Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan wajib dilampirkan Surat Kuasa kepada yang bersangkutan.

CONTOH DAFTAR PENGALAMAN PERUSAHAAN

No.	Pekerjaan	No Kontrak	Tahun Kontrak	BAST *)	Nilai (Rp)	Pemberi Tugas	Jumlah Lantai	Ketersediaan Basemen/ Semibasemen

*) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) atau dokumen lain yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan telah selesai.

PENGUMUMAN TENDER

No.28/ 15 /DMAP-GPPS-PBS/PENG/B tanggal 30 Maret 2026

Bank Indonesia akan melaksanakan **Tender Pengadaan Konsultan Perancang Rumah Dinas Bank Indonesia Kantor Pusat Kemanggisan, Jakarta**, dengan nomor Pengadaan RFQ: **52888**, melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Ruang lingkup Pekerjaan adalah perancangan Rumah Dinas Bank Indonesia (RDBI) Kantor Pusat Kemanggisan.
- II. Pagu anggaran sejumlah **Rp8.646.483.000,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)** sudah termasuk PPN 12%.

III. Persyaratan Peserta Tender:

1. Perusahaan Tunggal (bukan berbentuk konsorsium);
2. Badan usaha berbadan hukum berbentuk "Perseroan Terbatas" (PT) dan berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peserta telah terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia pada *E-Procurement* Bank Indonesia;
4. Perusahaan bergerak di bidang perencana Pekerjaan konstruksi dan memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) / Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang berwenang mengeluarkan sertifikasi, yaitu klasifikasi/sub klasifikasi (sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 5 Tahun 2021) sebagai berikut:

Bidang	Sub Klasifikasi	Kode Sub Klasifikasi	Kualifikasi
Perencanaan Arsitektur	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	AR001	Besar

Dalam hal sertifikasi dalam proses perpanjangan dan/atau peralihan, maka harus menyampaikan tanda terima bukti pengurusan dari LPJK/LSBU yang berwenang mengeluarkan sertifikasi.

5. Perusahaan harus memiliki pengalaman dalam pekerjaan perancangan untuk:
 - a. Bangunan hunian vertikal atau hotel di atas lima lantai tidak termasuk basement; dan
 - b. Bangunan bertingkat yang dilengkapi dengan semi-basemen atau basement.Pengalaman tersebut dapat dipenuhi dalam satu kontrak atau lebih dan merupakan proyek yang telah selesai terbangun dalam kurun waktu lima tahun terakhir (Maret 2021 s.d. Maret 2026) yang dibuktikan dengan:
 - a. Surat Perintah Kerja/Perjanjian/*Purchase Order* (PO) yang disertai dokumen pendukung lain yang menjelaskan jumlah lantai bangunan dan basement; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lain yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan telah selesai.
 6. Perusahaan memiliki Laporan Keuangan minimal tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian;
 7. Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan minimal tahun 2024 dengan menyampaikan paling kurang bukti penerimaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
 8. Dalam hal pernah melaksanakan proyek di Bank Indonesia, perusahaan tidak pernah memiliki *history* penilaian kinerja kurang baik dari Bank Indonesia dalam kurun waktu dua tahun terakhir (Maret 2024 s.d. Maret 2026);
 9. Perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam pada INAPROC dengan status tayang; dan
 10. Membuat Surat Pernyataan:
 - a. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
 - b. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
 - c. Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - d. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
 - e. Tidak terafiliasi kepengurusan perusahaan dengan peserta lain yang ikut mendaftar pada pengadaan ini; dan
 - f. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.
- IV. Persyaratan pendaftaran:
1. Calon Peserta harus terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia melalui <https://eprocurement.bi.go.id>.
 2. Syarat dan ketentuan calon Peserta lebih rinci dapat di akses melalui <http://www.bi.go.id/id/layanan/lelang-jasa-barang/default.aspx> atau <https://eprocurement.bi.go.id>.
 3. Pendaftaran calon Peserta dimulai sejak tanggal **31 Maret s.d. 8 April 2026** melalui <https://eprocurement.bi.go.id>.
 4. Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon Peserta Tender secara lengkap serta memenuhi persyaratan melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Tender.

5. Dalam hal calon Peserta mengalami kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, agar menghubungi petugas *helpdesk E-Procurement* pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat *e-mail*: Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id.

V. Komitmen Integritas Pengadaan

1. Pelaksanaan Pengadaan tunduk pada ketentuan Pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
2. Pengadaan di Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip anti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme serta gratifikasi. Panitia Pengadaan dan Peserta Tender wajib mematuhi komitmen ini.
3. Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun dari setiap proses Pengadaan.
4. Dalam hal terdapat hal-hal yang bertentangan dengan komitmen tersebut, harap segera laporkan melalui *whistleblowing system* Bank Indonesia melalui https://www.bi.go.id/wbsbi/add_wbs2.aspx.



Scan QR Code untuk melihat syarat pendaftaran.

PANITIA TENDER